

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pengaturan pajak pada sektor usaha mikro dan kecil adalah berikut ini. *Pertama*, sistem pajak yang dianut Indonesia yakni sistem pajak teritorial sebagaimana dalam klaster perpajakan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengacu pada prinsip sumber artinya penghasilan dikenakan pajak apabila penghasilan bersumber dari daerah pabean Indonesia. *Kedua*, terdapat perbedaan kriteria menurut UU UMK, UU Cipta Kerja, PP 23/2018, PP 7/2021, SAK ETAP/EMKM/ dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 172 Tahun 1997 dengan melihat hasil kekayaan bersih atau jumlah peredaran bruto yang diperoleh usaha mikro dan kecil. *Ketiga*, prinsip *ability to pay* dan kemudahan dalam membayar pajak menjadi prioritas pada PP 23/2018, namun prinsip *ease of administration and compliance* tidak terpenuhi karena banyaknya interaksi wajib pajak dengan dokumen yang harus dipenuhi wajib pajak, tidak ada terobosan administrasi untuk memenuhi kewajiban pajak penghasilan final, dan kompleksitas peraturan perpajakan. *Keempat*, pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bahwa UMK dikenakan tarif pajak penghasilan final 0,5% dan pelaku usaha mikro dan kecil tetap harus membayar meskipun mengalami kerugian karena dasar pengenaan pajak mengacu pada jumlah peredaran bruto.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada wajib pajak badan di sektor usaha mikro dan kecil mengalami beberapa hambatan. *Pertama*, hambatan yang bersumber dari asimetris informasi pajak yaitu berupa kurangnya pemahaman atas regulasi pajak yang berkembang, perbedaan informasi yang diberikan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan sulit mengakses informasi pajak yang valid. *Kedua*, hambatan terkait dengan administrasi pembayaran pajak dimana wajib pajak harus melakukan pengadministrasian bukti pembayaran pajak secara manual untuk jenis pajak yang berbeda. *Ketiga*, kesiapan dalam penyelenggaraan pembukuan dimana pelaku usaha mikro dan kecil tidak memahami aturan penyelenggaraan pembukuan, belum

memiliki karyawan yang memahami pembukuan, dan tidak memiliki akun biaya dan beban yang banyak seperti usaha besar, belum memahami cara membuat laporan arus kas dan melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang sinkron. Maka dari itu diperlukan usulan penyederhanaan beserta biaya administratif.

IV.2. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Aspek kemudahan harusnya diadopsi dalam memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan cara menghilangkan persyaratan dokumen yang harus dipenuhi wajib pajak sehingga dapat meminimalisir interaksi dokumen dengan wajib pajak. Perlu ada pengaturan yang memperbaiki sistem pajak yang dapat mendukung sistem *self assesment* yakni mempermudah proses pembetulan kode pajak, mereduksi persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Badan, mempermudah tata cara pembayaran pajak, membangun integrasi data pembayaran pajak melalui *PAYE (Pay As You Earn) Real Time Information*.
2. Mendorong sinkronisasi regulasi yang mengatur mengenai kriteria mengenai bentuk badan usaha mikro dan kecil dan kriteria pelaku usaha mikro dan kecil yang wajib menyelenggarakan pembukuan pada peraturan perundang-undangan.
3. Mendorong kebijakan yang mendukung perkembangan bisnis UMK yakni pembinaan dari otoritas pajak ketika wajib pajak menggunakan tarif pajak penghasilan final beralih ke skema pajak penghasilan umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- American Institute of Certified Public Accountants, *Guiding Principles of Good Tax Policy: A Framework for Evaluating Tax Proposals*. Amerika Serikat: University of Mississippi, 2001.
- Arben Krasniqi dan Arjeta Sahiti. *Standard Cost Model: Measuring and Reducing Administrative Burdens*. Swedia: Government Coordination Secretariat, 2018.
- Darussalam, Septriadi dan Dhora. *Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Dimensi Internasional Tax, 2020.
- Djohan Pinnarwan, et.al. *Exposure Draft: Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2016.
- Effendi, Jonaedi S.H., M.H. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- IFC dan World Bank. *Here is Your Money: Using the Standard Cost Model to Measure Regulatory Compliance Costs in Developing Countries*. Washington DC: The World Bank Group, 2010.
- International Monetary Fund. *Tax Policy and Administration (TPA-TTF)*. Washington D.C: International Monetary Fund, 2011.
- Janet Stosky. "The Base of Personal Income Tax" dalam *Tax Policy Handbook*. Washington DC: International Monetary Fund, 1999.
- John Snape. *Philosophical foundations of Tax Law*. United Kingdom: Oxford University Press, 2017.
- Organization for Economic Cooperation and Development Tax Policy Studies. *Taxation of SMEs in OECD and G20 Countries*. Paris: OECD Publishing, 2015.
- Organization for Economic Cooperation and Development. *International Standard Cost Model*. Paris: OECD Publishing, 2014.
- Rohatgi, Roy. *Basic International Taxation*, United Kingdom: Richmond Law & Tax Ltd, 2005.
- Stosky, Janet *The Base of Personal Income Tax* dalam *Tax Policy Handbook*. Washington DC: International Monetary Fund, 1999.

Thornton Matheson, Victoria Perry, dan Chandara Veung. *Territorial vs Worldwide Corporate Taxation: Implications for Developing Countries*. Washington D.C: International Monetary Fund, 2013.

Thuronyi, Victor. *Tax Law Design and Drafting*. Washington, D.C: International Monetary Fund Legal Department, 1998.

World Health Organization, *WHO Technical Manual on Tobacco Tax Administration*. Jenewa: World Health Organization, 2010.

JURNAL ILMIAH

Bawono Kristiaji dan Awwaliatul Mukarromah. “Meninjau Konsep dan Relevansi PPh final di Indonesia.” *DDTC Working Paper 2220* (4 Mei 2020):10.

Ebimobowei Appah dan Elizabeth C. Wosowei. “Tax Compliance Intentions and the Behaviour of the Individual Taxpayer: Evidence from Nigeria.” *Research Journal of Finance and Accounting Vol.7, No.13*, (2016):4.

Fahrurozi. “Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbadan Hukum dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemegang Saham Tunggal.” *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 7 Nomor 3, Desember 2018:455.

James, Simon. “Tax Simplification is Not a Simple Issue: The Reason for Difficulty And a Possible Strategy.” University of Exeter. *Discussion Papers in Management, Paper Number 07/18*, 2007:10

Kristiaji dan Awwaliatul. “Meninjau Konsep dan Relevansi PPh final di Indonesia.” *DDTC Working Paper 2220 Edisi 4 Mei 2020*:10-20.

Liana, Lie. “Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Program-Program Berbasis *Knowledge Management*.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Vol (1) Nomor.1 Edisi Juli 2008*:30

Mike Hammer. “Tax Ghosts: Spectres of The Shadow Economy.” *International Bureau of Fiscal Documentation Journal Edisi 17* (September 2018):4.

Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih. “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseroan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja”. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 9 Nomor 1* (April 2020):93.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR. “Perluakah Territorial Tax System?”. *Jurnal Buletin APBN, Edisi 6 Vol III*. (April 2018): 6.

Richard M. Bird dan J.Scott Wilkie. "Designing Tax Policy: Constraints Objectives in an Open Economy." *International Center for Public Policy Georgia State University Working Paper 12-24* (2012): 4.

Sonja Dusardujin dan Hans Gribnau. "Balancing Conflicting Conceptions of Justice in Taxation". *Jurnal SSRN Tilburg Law School*, (November 2020):20

Teti Rahmawati dan Oktaviani Rita Puspasari. "Implementasi SAK ETAP dan Kualitas Laporan Keuangan UMK Terkait Akses Modal Perbankan". *Jurnal Kajian Akuntansi Vol 1 (1)(2017)*:3.

The Scottish Government, "Using the Standard Cost Model to Measure Administrative Burden: a Pilot Using Scotland's Environmental and Rural Services (SEARS) as a Case Study." (Scottish Government Social Research:Scotland,2010:40.

Vladimir N. Nazarov. "Tax System: The Concept and its Legal Content". *Jurnal IEJME – Mathematics Education 2016 Vol 11 No.7* (October 2016):6.

INTERNET

Arum Sutrisni Putri. "Peran UMK dalam Perekonomian Indonesia". *Kompas.com*, 20 Desember 2019 (<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-UMK-dalam-perekonomian-indonesia?page=all>) diakses 5 April 2021.

Darussalam. "Konsep Penghasilan dalam Konteks Pajak". *DDTCNews*, 26 Desember 2019, (<https://news.ddtc.co.id/konsep-penghasilan-dalam-konteks-pajak-18208>), diakses 23 November 2020.

Darussalam. "Menyoal Perluasan Withholding Tax atas Penghasilan Usaha". *DDTCNews*, 02 Juli 2018, (https://news.ddtc.co.id/menyoal-perluasan-withholding-tax-atas-penghasilan-usaha-13008?page_y=729) diakses 23 November 2020.

Direktorat Jenderal Pajak, "Bukan SKB, Surat Keterangan UMK". *DJP Online*, Maret 2018, (<https://www.pajak.go.id/artikel/bukan-skb-surat-keterangan-UMK-yang-perlu-diketahui>) diakses 05 Mei 2021.

Direktorat Jenderal Pajak, "Bukan SKB, Surat Keterangan UMK". *DJP Online*, Maret 2018, (<https://www.pajak.go.id/artikel/bukan-skb-surat-keterangan-UMK-yang-perlu-diketahui>) diakses 11 Mei 2021.

- Direktorat Jenderal Pajak, “Formulir Permohonan EFIN”. *DJP Online*, 27 Maret 2019, (<https://www.pajak.go.id/formulir-permohonan-efin>) diakses 05 Mei 2021.
- Direktorat Jenderal Pajak, “Pembetulan Ketetapan Pajak,” *DJP Online*, 28 Agustus 2020, (<https://pajak.go.id/index.php/id/pembetulan-ketetapan-pajak>) diakses 15 Mei 2021.
- Direktorat Jenderal Pajak, “Pemindahbukuan Ditolak? Ini Cara Ajukan Permohonan”. *DJP Online*, 28 Agustus 2020, (<https://www.pajak.go.id/id/artikel/pemindahbukuan-ditolak-ini-cara-ajukan-kembali-permohonan>) diakses 11 Mei 2021.
- Direktorat Jenderal Pajak, “Siapkan EFIN Sebelum Lapor SPT Online”. *DJP Online*, 28 Maret 2017, (<https://www.pajak.go.id/id/artikel/siapkan-efin-sebelum-lapor-spt-online>) diakses 05 Mei 2021.
- Doni Agus Setiawan. “Sistem Pajak Jadi Teritorial, Begini Penjelasan Dirjen Pajak”. *DDTCNews*, 06 September 2019 (https://news.ddtc.co.id/sistem-pajak-jadi-teritorial-begini-penjelasan-dirjen-pajak-17001?page_y=1156) diakses 09 Mei 2021.
- Henry Ordower, “Schedularity in U.S Income Taxation and It’s Effect on Tax Distribution”. Northwestern Pritzker School of Law Scholarly, Oktober 2017 (<https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=nulr>) diakses 09 Mei 2021.
- Ikatan Akuntan Indonesia. “Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik”. *IAI Global*, Oktober 2016 (<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/etap>) diakses 07 April 2021.
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. “Panduan Registrasi UKM”. *UKM Indonesia*, (www.ukmindonesia.id), diakses 21 Mei 2021.
- Muhamad Wildan. “Aturan Baru! Begini Syarat WNI Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri”. *DDTCNews*, 01 Maret 2021 (https://news.ddtc.co.id/aturan-baru-begini-syarat-wni-menjadi-subjek-pajak-luar-negeri-28109?page_y=710) diakses 09 Mei 2021.
- Muhammad Wildan. “Diperpanjang 6 Bulan, Ini Ketentuan Pajak UMK Ditanggung Pemerintah”. *DDTCNews*, 08 Februari 2021 (https://news.ddtc.co.id/diperpanjang-6-bulan-ini-ketentuan-pajak-UMK-ditanggung-pemerintah-27594?page_y=906) diakses 15 Maret 2021.
- Nora Galuh Candra Asmarani. “Ini Alasan Kenapa UMK Perlu Perlakuan Pajak Khusus”. *DDTC News*, 10 Juni 2021, (<https://news.ddtc.co.id/ini-alasan>

- [kenapa-UMK-perlu-perlakuan-pajak-khusus-30466?page_y=1201](#)) diakses 12 Juni 2021.
- Nora Galuh Candra Asmarani. “Menjawab Tantangan Memajaki UMK, Ini Masukan Para Akademisi”. *DDTCNews*, 11 Agustus 2020 ([https://news.ddtc.co.id/menjawab-tantangan-memajaki-UMK-ini-masukan-para-akademisi-23033](#)) diakses 05 November 2020.
- Nora Galuh Candra Asmari, “Apa itu Pajak Penghasilan Final?”. *DDTCNews*, 08 Mei 2020, ([https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-penghasilan-final-20795?page_y=1307](#)) diakses 07 April 2021.
- Redaksi DDTCNews. “Detail Perubahan UU Pajak dalam UU Cipta Kerja”. *DDTCNews*, 13 Oktober 2020, ([https://news.ddtc.co.id/detail-perubahan-3-uu-pajak-dalam-uu-cipta-kerja-download-di-sini-24654](#)) diakses 12 Mei 2020.
- Ringkang Gumiwang. “Cara Mudah Cek Nomor NTPN di DJP Online”, *DDTCNews*, 08 Mei 2020 ([https://news.ddtc.co.id/cara-mudah-cek-nomor-ntpn-di-djp-online-20792?page_y=2621.333251953125](#)), diakses 20 Mei 2021.
- Safira Fitri. “4 Kemudahan Koperasi dan UMK dalam UU Ciptaker”. *Economy Okezone*, 08 Oktober 2020, ([https://economy.okezone.com/read/2020/10/08/455/2290304/4-kemudahan-koperasi-dan-UMK-dalam-uu-ciptaker](#)) diakses 22 November 2020.
- SAP Community. “Automatic Tax Posting”. *SAP Community*, ([https://help.sap.com/viewer/6a49d1604ffc4b908f9f78fba3824187/6.17.17/en-US/0847d953189a424de10000000a174cb4.html](#)) diakses 5 Juni 2021.
- Saskhia Kohlase. “Effects of Worldwide and Territorial Tax System”. *RSM Discovery*, 11 Februari 2020 ([https://discovery.rsm.nl/articles/424-effects-of-worldwide-and-territorial-tax-systems/](#)) diakses 12 Mei 2021.
- Sigit Wibowo, “Menyelaraskan Standar Akuntansi dengan Peraturan Pajak”. *MUCGlobal*, 20 April 2020, diakses 09 April 2021, [https://mucglobal.com/id/news/2061/menyelaraskan-standar-akuntansi-dengan-peraturan-pajak](#).
- Vidya Prahassacitta. “Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis”. *Business Law Binus* ([https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/](#)) diakses 17 Desember 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor.36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2019 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan UMK

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2019 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak dan Penyetoran Pajak.